



KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang Bina Ideologi Kebangsaan, Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, ini yang merupakan salah satu komponen organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan disusunnya LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu tahun 2018.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada anggota tim yang telah menyelesaikan penyusunan LPPD Tahun 2018 sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Tanjung Selor, 05 Pebruari 2019

Kepala,

Drs. BASIRAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691228 199101 1 001

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Hukum.....	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	2
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	3
D. Visi dan Misi.....	4
E. Strategi dan Arah Kebijakan	6
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	10
2.1. Program dan Kegiatan	10
2.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	11
2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	12
2.4. Perencanaan Pembangunan	13
2.5. Sarana dan Prasarana	16
2.6. Permasalahan dan Solusi	19
BAB III TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	20
3.1. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.....	20
A. Forum Koordinasi.....	20
B. Materi Koordinasi.....	20
C. Instansi Vertikal Yang Terlibat	20
D. Sumber dan Jumlah Anggaran	20
E. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan.....	20
F. Hasil dan Manfaat Koordinasi	21
G. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi	21
H. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.....	22
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN:	
1. IKK-LPPD Tahun 2018	
2. URUSAN KESBANGPOL	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat.

1.2. GAMBARAN HUKUM

A. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah di bentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut:

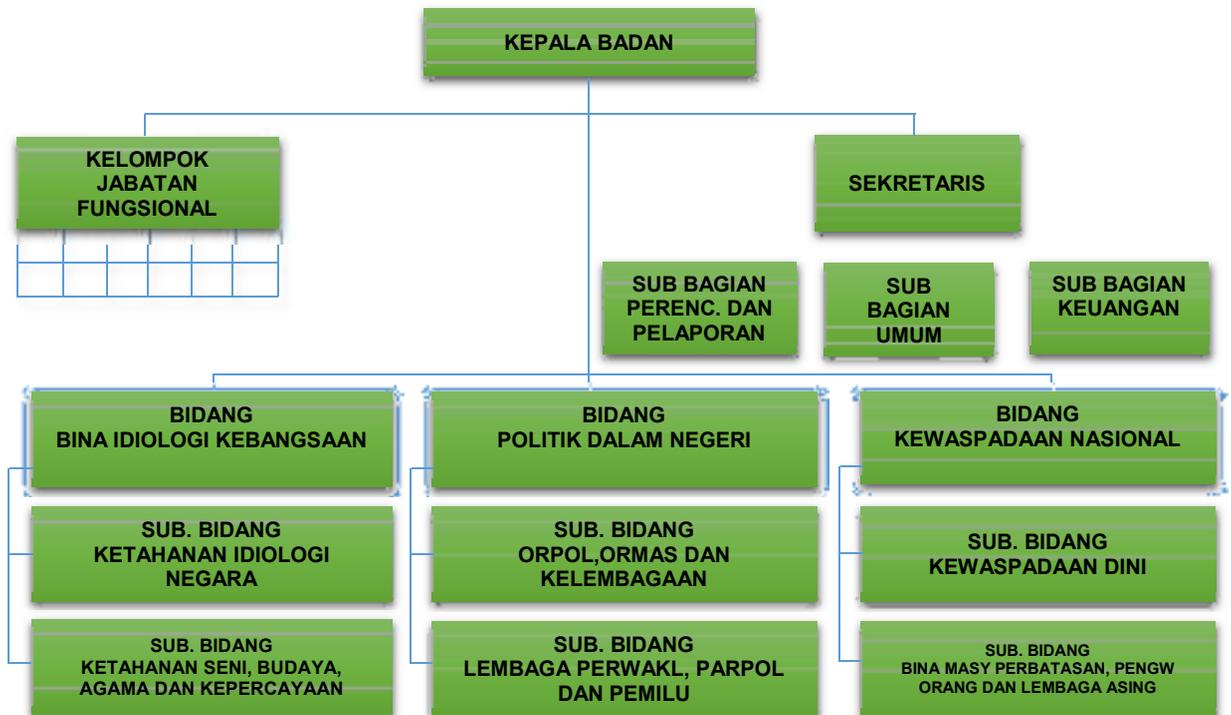
- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Kepala Sub Bagian Umum
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a) Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b) Sub. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- 4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a) Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b) Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu



- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a) Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b) Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

Tabel 1.1

**Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)**



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak **32 (Tiga puluh dua)** orang yang terdiri dari : Paska Sarjana (S2) sebanyak **5 (lima)** orang ,Sarjana (S1) sebanyak **18 (Delapan belas)** orang, D.3 sebanyak **3 (Tiga)** Orang dan SLTA sebanyak **6 (Enam)** orang, jumlah tersebut sangat belum mencukupi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang ada.



Tabel 1.2

**Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Pejabat Struktural dan Fungsional
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018**

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR							GOLONGAN				JML
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	ESL	SD	SMP	SLTA	D.3	S.1	S.2	S.3	I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	1	-	II/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kasubbag. Perenc dan Pelaporan	1	-	IV/A	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Kasubbag. Keuangan	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
5	Kasubbag Umum	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
6	Kabid. Idiologi Kebangsaan	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
7	Kasubbid. Ketahanan Idiologi Negara	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
8	Kasubbid. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan	1	-	IV/A	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Kabid. Poldagri	1	-	III/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
10	Kasubbid. Orpol, Ormas dan Kelembagaan	1	-	IV/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
11	Kasubbid. Lembaga Partai Politik dan Pemilu	1	-	IV/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
12	Kabid. Kewasnas	1	-	III/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
13	Kasubbid. Kewaspadaan Dini	1	-	IV/A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
14	Kasubbid. Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	1	-	IV/A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
15	Pelaksana	-	18	-	-	-	4	3	11	-	-	-	7	11	-	18
		14	18	-	0	0	6	3	18	5	0	0	7	20	5	32

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Dalam upaya menciptakan ketertiban administrasi pelayanan kepada masyarakat maka telah ditetapkan Standar Operasional (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3

**Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara**

NO	NAMA SOP	KETERANGAN
1	Penerbitan Surat Keterangan Lapor (SKL)	Bidang Politik Dalam Negeri
2	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Bidang Politik Dalam Negeri
3	Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Bidang Kewaspadaan Nasional
4	Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Bidang Politik Dalam Negeri
5	Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Kepada LSM/Ormas/OKP	Bidang Politik Dalam Negeri

D. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.



Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. **Misi**

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”*** yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan



kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:

- a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
- b) Faktor penghambat:
 1. Masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
 2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.



2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- b) Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

1) Analisa Lingkungan Internal

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara di masa yang akan datang tidak dapat terelakan dari pengaruh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang



ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan mengingat begitu kompleksnya variabel yang berkaitan dengan faktor internal.

a. Kekuatan

1. Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Sarana dan parasana pendukung kinerja organisasi cukup memadai.
3. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang.

b. Kelemahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik.
2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial
3. Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai.
4. Hubungan hirarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.

2) Analisa Lingkungan Eksternal

Berbagai usaha untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

a. Peluang

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini.
3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara.



4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai.
- b. Tantangan
1. Disintegrasi bangsa dikarenakan sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan.
 2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Adanya kecenderungan sikap tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya.
 4. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah.
 5. Adanya kecenderungan pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan.
 6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata.
 7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal.

Tabel 1.2.4
Analisis Strategik Dengan Faktor SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan RPJMD. 2. Sarana dan sarana pendukung kinerja cukup memadai. 3. Sumber daya aparatur memiliki kemauan untuk berkembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi berpolitik. 2. Isu SARA sering menjadi pemicu konflik sosial 3. Kuantitas dan kualitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai. 4. Hubungan hierarki antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota yang kurang jelas.



PELUANG (O)	S + O	O + W
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketenteraman dan kenyamanan di Kalimantan Utara. 2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini. 3. Dukungan orpol, ormas dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di Kalimantan Utara. 4. Dukungan dari pemerintah daerah atas perumusan, perencanaan, pembinaan serta kebijakan guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan optimalisasi dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dengan ilmu pengetahuan yang ada. 2. Memacu peluang kerja-sama dalam segala bidang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas . 3. Sosialisasi dan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 	
ANCAMAN/HAMBATAN (T)	S + T	W + T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman disintegrasi bangsa karena sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pedalaman dan perbatasan. 2. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. 3. Berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung yang sebebas-bebasnya. 4. Unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan daerah. 5. Pengambilan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak responsif dan belum sepenuhnya transparan. 6. Kondisi geografi dan demografi yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata. 7. Kondisi akses jalan yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial. 2. Menyusun strategi kebijakan untuk memacu kegiatan dalam pelaksanaan tugas. 3. Meningkatkan hubungan komunikasi yg efektif antara pemerintah dan masyarakat 4. Meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Menciptakan pembangunan sumberdaya manusia dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kewaspadaan dimasyarakat terhadap ancaman baik dari dalam atau luar. 3. Menegakkan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah konflik secara arif & bijaksana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada.

3) Strategi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, maka di tetapkan strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial.

4) Kebijakan

Dalam upaya mendukung strategi tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah mengadakan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik serta membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).



BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang di rencanakan untuk tahun 2018.

2.1.1. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2.1.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor.
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
10. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor.



11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12. Penyediaan makanan dan minuman.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
14. Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke`dalam daerah.
15. Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas.
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
17. Pendidikan dan pelatihan formal.
18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
19. Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
20. Pengendalian konflik sosial dimasyarakat.
21. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat.
22. Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing.
23. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
24. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
25. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
26. Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
27. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
28. Penyuluhan politik kepada masyarakat.
29. Peningkatan kapasitas partai politik.
30. Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya.
31. Sosialisasi nilai index demokrasi Indonesia(IDI) di Kalimantan utara
32. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada..



2.2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun semenjak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 April 2013 dan terbentuknya perangkat daerah yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana pada tanggal 22 Mei 2013 dan berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 10 Juli 2014 sampai saat ini, telah tercapai target kinerja pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK Akhir Renstra	Target Renstra Perangkat Daerah (%)	Realisasi Capaian (%)	Rasio Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase angka potensi konflik sosial yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).	5%	14	12,65	110,71
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.	85%	76	65,98	86,81

2.3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 10.143.249.088,- (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah)** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.641.742.164,- (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan belanja langsung sebesar **Rp. 5.501.506.924,- (Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)** sedangkan realisasinya adalah **Rp 9.083.459.687,- (Sembilan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 89,55 %** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp 4.087.225.749,- (Empat Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 88,05 %**, dan belanja langsung sebesar **Rp**



4.996.233.938,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **90,82 %** jika diuraikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	4.641.742.164	4.641.742.164	4.087.225.749	88,05
	Belanja Pegawai	4.641.742.164	4.641.742.164	4.087.225.749	88,05
II	Belanja Langsung	5.511.506.924	5.501.506.924	4.996.233.938	90,82
	- Belanja Pegawai	1.679.950.000	1.201.896.000	1.141.171.925	94,95
	- Belanja Barang dan Jasa	3.784.056.924	4.252.110.924	3.812.660.926	89,67
	- Belanja Modal	47.500.000	47.500.000	42.401.100	89,27
	Jumlah	10.153.249.088	10.143.249.088	9.083.459.687	89,55

2.4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja untuk masing – masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dan Indikator Sasaran 2018

Sasaran					
No	Uraian Kinerja	Indikator		Satuan	Target
	1	2		3	4
1.	Terwujudnya transparansi pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	1	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Surat	600
		2	Jumlah bulan penyediaan jasa listrik, air, komunikasi dan internet	Bulan	12



		3	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	Bulan	12
		4	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	Bulan	12
		5	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Unit	25
		6	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan	Bulan	12
		7	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12
		8	Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	Bulan	12
		9	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5
		10	Jumlah pengadaan alat rumah tangga kantor	Jenis	2
		11	Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	Exemplar	2.160
		12	Jumlah porsi makan/minum	Porsi	4.000
		13	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	60
		14	Jumlah rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Kali	140
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	1	Jumlah gedung/kantor yang disewa	Unit	1
		2	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dirawat	Unit	33
3.	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	1	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/diklat	Orang	27
		2	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan	1
4.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	1	Jumlah penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan	Kegiatan	2
		2	Jumlah rapat pengendalian penanganan konflik dengan instansi terkait	Kegiatan	3
		3	Jumlah kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dilingkungan masyarakat	Kegiatan	2
		4	Jumlah rapat dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing	Kegiatan	3



5.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan antar golongan	1	Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat	Kegiatan	1
		2	Jumlah kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	Kegiatan	1
		3	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kegiatan	1
		4	Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPK)	Kegiatan	1
		5	Jumlah seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Kegiatan	2
6.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	1	Jumlah penyuluhan tentang partai politik	Kali	7
		2	Jumlah verifikasi dan monitoring bantuan keuangan partai politik	Kali	12
		3	Jumlah pelayanan atas pengajuan SKT,SKL ormas dan verifikasi bantuan hibah ormas	Kali	6
		4	Jumlah sosialisasi tentang IDI di kalimantan utara	Kegiatan	1
		5	Jumlah sosialisasi undang-undang pemilihan umum	Kegiatan	1

Indikator Kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

- a. Masukan (**Inputs**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (**Outputs**) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan ;
- c. Hasil (**Outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. **Outcomes** merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- d. Manfaat (**Benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran (**outputs**) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik ;



- e. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Oleh karena itu untuk kegiatan tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara baru menerapkan indikator kinerja kegiatan berupa input, Output, dan Outcome sedangkan Benefit dan Impact belum diterapkan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data untuk indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif.

2.5. SARANA DAN PRASARANA

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Sarana Dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018



NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	
1	2	3	4	
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014



33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014
36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	4	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Eselon IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Eselon IV	7	Pengadaan	2016
65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016
67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portabel	1	Pengadaan	2016



69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inci	1 Unit	Pengadaan	2017
80.	Komputer PC	1 Unit	Pengadaan	2018
81.	Printer Epson L565	3 Unit	Pengadaan	2018
82.	Lemari Arsip/Filling	3 Unit	Pengadaan	2018

2.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola program dan kegiatan ada beberapa kegiatan yang belum 100% dilaksanakan dengan alasan ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kegiatan peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya bahwa pengadaan website belum terlaksana dikarenakan peralihan pegawai yang menangani hal tersebut.
- b. Kegiatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada, bahwa adanya rekening untuk uang saku tidak dibayarkan kepada peserta dikarenakan anggaran tidak mencukupi.

Kedepannya diharapkan semua kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga tidak ada lagi kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun anggaran. Perencanaan harus dilakukan dengan matang dan terencana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.



BAB III

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

3.1. KOORDINASI UMUM PEMERINTAHAN

A. Forum Koordinasi

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

B. Materi Koordinasi

1. Menciptakan dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat.
3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.

C. Instansi Vertikal Yang Terlibat

1. Kementerian Agama Wilayah/Kabupaten/Kota.
2. Badan Intelijen Daerah (Binda) Prov. Kalimantan Utara.
3. Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman.
4. Komando Resort Militer 091/ASN
5. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara.
6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
7. Kejaksaan Negeri se Kalimantan Utara.
8. Kantor Imigrasi Tarakan dan Nunukan.
9. Kepolisian Resort se Kalimantan Utara.
10. Komando Distrik Militer se Kalimantan Utara.

D. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara tidak menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan forum-forum yang bekerja sama namun pemerintah provinsi memberikan bantuan/hibah keuangan sebagai berikut:



1. FKUB sebesar Rp.2.500.000.000
2. FKDM sebesar Rp.200.000.000
3. FPK sebesar Rp.200.000.000

E. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

2. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema Eksistensi FKUB Dalam Upaya Meningkatkan Perilaku Toleran Dan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Utara 2018 pada tanggal 24 Maret 2018 di Ruang Bandiklat Kab. Bulungan Tanjung Selor dan Rapat Koordinasi Nasional FKUB dan Konferensi Nasional IV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 06-08 September 2018 di Tarakan
3. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dengan tema peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada tanggal 01 Agustus 2018 di Ruang Pertemuan Hotel Laura Nunukan.
4. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 13 Nopember 2018 di Gedung Gadis Pemprov. Kalimantan utara di Tanjung Selor.
5. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di laksanakan pada tanggal 26 Nopember 2018 di Hotel Duta Tarakan.

F. Hasil dan Manfaat Koordinasi

1. Meningkatkan peran dan fungsi FKDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan fungsi FPK Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.
3. Meningkatkan peran dan fungsi FKUB Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.
4. Meningkatkan peran dan fungsi PPWK Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.



G. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

1. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FKDM untuk meningkatkan kewaspadaan dini di kabupaten/kota masing-masing.
2. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FPK untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras dan antar golongan.
3. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bisa menjadi bahan tindak lanjut bagi anggota FKUB untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.
4. Rapat koordinasi dan sosialisasi PPWK Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

H. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Forum-forum yang ada di Provinsi Kalimantan Utara perlu di berikan ruang, pembinaan dan pengawasan agar dapat tetap konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara agar dapat terwujud rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya.



BAB IV

PENUTUP

Setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagai bahan evaluasi organisasi perangkat daerah terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dengan adanya laporan ini dapat menjadi tolak ukur dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Segala hambatan dan tantangan pasti ada dalam setiap hal yang dilakukan tetapi tidak mengurangi semangat dalam bekerja demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Seluruh Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan kontribusi dan dukungan agar dapat mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran dari Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat terus maju dalam membangun Kalimantan Utara.

Dengan demikian semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini dapat berguna bagi berbagai pihak dan menjadi acuan untuk penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NAMA SKPD

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

: URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100 %	Berdasarkan Program Nasional RKP 2015
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 5 SOP 1. SOP tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas, LSM 2. SOP tentang Surat Rekomendasi Penelitian (SRP) 3. SOP tentang Pencairan Bantuan keuangan kepada Partai Politik 4. SOP tentang Penerbitan Surat Keterangan Laporan (SKL) 5. SOP tentang Verifikasi Bantuan Hibah kepada LSM/Ormas dan OKP	Ada 5	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- Perda pelaksanaan sebanyak 2 1. Perda No:6/2017 tentang APBD tahun 2018 2. Perda No:5/2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	Normalisasi
	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 14 - Jabatan yang ada sebanyak 14	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Belum terisi	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 32 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 3.483 personil	0,91 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan diklat pim dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org	85,71 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada 3 dokumen perencanaan 1. RENSTRA- SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada 3	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100 %	- Total APBD SKPD, sebesar Rp. 10.143.249.088,- - Total Belanja APBD PROV Thn. 2018 sebesar Rp. 2.884.079.048.435,19	0,35 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 42.401.100,- - Total APBD SKPD, sebesar Rp. 9.083.459.687,-	0,46 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 87.230.596,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.812.660.926,-	2,28 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 87.230.596 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.083.459.687,-	0,96 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada 3 dokumen pelaporan keuangan 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada 3	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada 3 Jenis dokumennya 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) B 2. Kartu Rekapitulasi Barang (KIB) B 3. Buku Inventaris	Ada 3	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.863.338.300,-	Tidak Ada 100 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Website 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media 6. Baliho	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas dan Prasarana ada 4 : 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Baliho 5. Banner	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Hasil survey kepuasan publik masyarakat terhadap pelayanan public urusan kesbangpol	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

Tanjung Selor, 05 Pebruari 2019
Kepala,

Drs.BASIRAN, M.Si
NIP. 19691228 199101 1 001

LAMPIRAN LPPD TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

URUSAN KESBANGPOL

NO	DATA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN	JADWAL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	4 Kegiatan	Silaturahmi Gubernur Kalimantan Utara Dan Dirjen Polpum Kemendagri RI Dengan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan, Tim Sukses Paslon, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Kota Tarakan Menuju Pilkada Damai	14 Pebruari 2018	±100 Peserta	1 Tarakan
			Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	15 Mei 2018	±80 Peserta	2 Tanjung Selor
			Rapat koordinasi sinergitas Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara Dengan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Utara	27 September 2018	±60 Peserta	3 Tanjung Selor
			Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi	08 Oktober 2017	±100 Peserta	4 Tarakan
2	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota	27 November 2018	±100 Peserta	1 Tarakan
3	Kegiatan peningkatan kewaspadaan dini	3 Kegiatan	Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan Tanggal 21 April 2018	21 April 2018	±80 Peserta	1 Tarakan
			Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan Tema” Peningkatamn Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Deteksi Dini Dan Cegah Dini Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Di Wilayah Nunukan	01 Agustus 2018	±60 Peserta	2 Nunukan
			Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang FKDM di Daerah	27 Nopember 2018	±100 Peserta	3 Tarakan
4	Kegiatan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial	2 Kegiatan	Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Periode B.04.	25 April 2018	±40 Peserta	4 Tanjung Selor

			Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	26 Nopember 2018	±40 Peserta	5	Tarakan
5	Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	Kebangsaan Tahun 2018 di Tarakan Tema "Semangat Nasionalisme dan Peran Pemuda Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Paham Radikalisme, Hoax, dan Narkoba di <i>Studio RRI Tarakan</i>	9 Maret 2018	±30 Peserta	1	Tarakan
			Rakor FKUB Tahun 2018 Tema "Peranan FKUB Prov. Kaltara dalam Pencegahan berkembangnya Paham Radikalisme serta Intoleransi di Daerah" Se-Provinsi Kalimantan	24 April 2018	±80 Peserta	2	Tanjung Selor
			Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pengetahuan Umum Tingkat Ormas/LSM/OKP Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018	14- 15 Mei 2018	±18 Peserta	3	Tanjung Selor
			Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018	21 Mei 2018	±300 Peserta	4	Tanjung Selor
			Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018	01 Oktober 2018	±500 Peserta	5	Tanjung Selor
			Talk Show On Air Wawasan Kebangsaan Tahun 2018	23 Oktober 2018	±80 Peserta	6	Tanjung Selor
			Rapat Koordinasi FPK Se-Provinsi Kalimantan Utara	13 Nopember 2018	±60 Peserta	7	Tanjung Selor
			Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Se-Provinsi Kalimantan Utara	26 Nopember 2018	±150 Peserta	8	Tarakan

Tanjung Selor, 05 Pebruari 2019
Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara

Drs. BASIRAN, M.Si
NIP. 19691228 199101 1 001

DATA UMUM (IKK-LPPD) TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	
		URUSAN	
1	Dasar Pembentukan SKPD	Pergub No.10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan	
2	Nama/Nomenklatur SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	
3	Struktur Organisasi	(Lampiran Struktur Organisasi)	
4	Komposisi Pegawai		
	a. Eselon II	1 Orang	
	b. Eselon III	4 Orang	
	c. Eselon IV	9 Orang	
	d. Fungsional Tertentu	0 Orang	
	e. Staff Pelaksana	18 Orang	
5	Syarat Pendidikan Pelatihan Jabatan		
	a. Eselon II (PIM II)	1 Orang	
	b. Eselon III (PIM III)	4 Orang	
	c. Eselon IV (PIM IV)	7 Orang	
6	Syarat Kepangkatan		
	a. Eselon II (Min. IV/b)	1 Orang	
	b. Eselon III (Min. III/d)	4 Orang	
	c. Eselon IV (Min. III/b)	9 Orang	
7	Program Nasional yang Dilaksanakan	1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
8	Program dan Kegiatan	(Lampiran RKA dan DPA Tahun 2018)	
9	Anggaran		
	Total Pagu :	Rp	10.143.249.088
	Belanja Tidak Langsung	Rp	4.641.742.164
	Belanja Langsung	Rp	5.501.506.924
	-Belanja Pegawai	Rp	1.201.896.000
	-Belanja Barang dan Jasa	Rp	4.252.110.924
	-Belanja Modal	Rp	47.500.000
	Total Realisasi :	Rp	9.083.459.687
	Belanja Tidak Langsung	Rp	4.087.225.749
	Belanja Langsung	Rp	4.996.233.938
	-Belanja Pegawai	Rp	1.141.171.912
	-Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.812.660.926
	-Belanja Modal	Rp	42.401.100
10	Buku Inventaris Aset		
	Total Aset yang Ada di SKPD	Rp	4.863.338.300
	Total Aset yang Tidak Digunakan (Layak Pakai)	Rp	-

11	Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan (Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat)	Tidak Ada
12	Penghargaan yang diterima SKPD di Tahun 2018 dari Pemerintah Pusat	Tidak Ada
13	Sarana Informasi	1 Website
		2 Baliho
		3 Benner
		4 Pos Pengaduan
		5 Papan Pengumuman
14	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Penerbitan Surat Keterangan Lapor (SKL)
		2 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		3 Penerbitan Rekomendasi Penelitian
		4 Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
		5 Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Kepada LSM/Ormas/OKP

Tanjung Selor, 05 Pebruari 2019
Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara

Drs. BASIRAN, M.Si
NIP. 19691228 199101 1 001

Lampiran 1.3
LAMPIRAN LPPD TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

URUSAN KESBANGPOL

NO	DATA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN	JADWAL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	4 Kegiatan	Silaturahmi Gubernur Kalimantan Utara Dan Dirjen Polpum Kemendagri RI Dengan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan, Tim Sukses Paslon, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Kota Tarakan Menuju Pilkada Damai	14 Pebruari 2018	±100 Peserta	1 Tarakan
			Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	15 Mei 2018	±80 Peserta	2 Tanjung Selor
			Rapat koordinasi sinergitas Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara Dengan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Utara	27 September 2018	±60 Peserta	3 Tanjung Selor
			Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi	08 Oktober 2017	±100 Peserta	4 Tarakan
2	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota	27 November 2018	±100 Peserta	1 Tarakan
3	Kegiatan peningkatan kewaspadaan dini	3 Kegiatan	Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan Tanggal 21 April 2018	21 April 2018	±80 Peserta	1 Tarakan
			Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan Tema” Peningkatamn Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Deteksi Dini Dan Cegah Dini Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Di Wilayah Nunukan	01 Agustus 2018	±60 Peserta	2 Nunukan
			Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang FKDM di Daerah	27 Nopember 2018	±100 Peserta	3 Tarakan
4	Kegiatan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial	2 Kegiatan	Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Periode B.04.	25 April 2018	±40 Peserta	4 Tanjung Selor

			Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	26 Nopember 2018	±40 Peserta	5	Tarakan
5	Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	Kebangsaan Tahun 2018 di Tarakan Tema "Semangat Nasionalisme dan Peran Pemuda Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Paham Radikalisme, Hoax, dan Narkoba di <i>Studio RRI Tarakan</i>	9 Maret 2018	±30 Peserta	1	Tarakan
			Rakor FKUB Tahun 2018 Tema "Peranan FKUB Prov. Kaltara dalam Pencegahan berkembangnya Paham Radikalisme serta Intoleransi di Daerah" Se-Provinsi Kalimantan	24 April 2018	±80 Peserta	2	Tanjung Selor
			Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pengetahuan Umum Tingkat Ormas/LSM/OKP Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018	14- 15 Mei 2018	±18 Peserta	3	Tanjung Selor
			Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018	21 Mei 2018	±300 Peserta	4	Tanjung Selor
			Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018	01 Oktober 2018	±500 Peserta	5	Tanjung Selor
			Talk Show On Air Wawasan Kebangsaan Tahun 2018	23 Oktober 2018	±80 Peserta	6	Tanjung Selor
			Rapat Koordinasi FPK Se-Provinsi Kalimantan Utara	13 Nopember 2018	±60 Peserta	7	Tanjung Selor
			Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Se-Provinsi Kalimantan Utara	26 Nopember 2018	±150 Peserta	8	Tarakan

Tanjung Selor, 05 Pebruari 2019
Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara

Drs. BASIRAN, M.Si
NIP. 19691228 199101 1 001

Lampiran I : Dokumentasi Kegiatan SKPD dalam merealisasikan APBD

I. Sekretariat

NO	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1.	<p>Rakor Kesbangpol Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018</p> <p>Royal Tarakan Hotel, Selasa, 27 November 2018</p>		<p>Peserta Kegiatan Rakor Kesbangpol Tingkat Provinsi Kalimantan Utara adalah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten dan Kota, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKDM), FKUB, FKDM, FPK, dan Anggota Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Utara.</p>
	<p>Rakor Kesbangpol Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018</p> <p>Royal Tarakan Hotel, Selasa, 27 November 2018</p>		<p>Narasumber terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Sanusi, M.Si dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 2. Bpk. Heru Matador dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri; 3. Bpk. Akhmad Mukhlis Yusuf dari Anggota Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental; 4. Bpk. Yodie Indrawan dari Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri.

<p>Rakor Kesbangpol Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Royal Tarakan Hotel, Selasa, 27 November 2018</p>		<p>Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dengan peserta dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten Kota (Masing-masing 5 orang perwakilan). Dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.</p>
--	--	---

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
----	-----------------	-------------	-------------------

II. Bidang Kewaspadaan Nasional

<p>1.</p>	<p>Sosialisasi dan Rapat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Propinsi Kalimantan Utara di <i>Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan Tanggal 21 April 2017</i></p>		<p>Para Peserta Raker Kesbangpol yang terdiri dari Badan Kesbangpol Kab/Kota, Camat Kab/Kota, KKUB, FPK, FKDM, serta Ormas se Provinsi Kalimantan Utara</p>
	<p>Sosialisasi dan Rapat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Propinsi Kalimantan Utara di <i>Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan Tanggal 21 April 2017</i></p>		<p>Para Peserta Raker Kesbangpol yang terdiri dari Badan Kesbangpol Kab/Kota, Camat Kab/Kota, KKUB, FPK, FKDM, serta Ormas se Provinsi Kalimantan Utara</p>

No	Kegiatan	Foto Kegiatan	Keterangan
2.	<p>Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan Tema” Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Deteksi Dini Dan Cegah Dini Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Di Wilayah Nunukan Di Hotel Laura, Nunukan 1 Agustus 2018</p>		<p>Kaban Kesbangpol Sebagai Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan</p>
	<p>Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan Tema” Peningkatamn Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Deteksi Dini Dan Cegah Dini Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Di Wilayah Nunukan Di Hotel Laura, Nunukan 1 Agustus 2018</p>		<p>Peserta Kegiatan Penyuluhan Pengendalian Keamanan Dan Keamanan Lingkungan</p>

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
3.	Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 di Hotel Royal Tarakan, 27 November 2018		Asisten 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Bapak Heru Matador, Msi (Kasubdit Pengawasan Orang Asing Kemnendagri) sebagai narasumber
	Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 di Hotel Royal Tarakan, 27 November 2018		Peserta Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 di Hotel Royal Tarakan, 27 November 2018

<p>4.</p>	<p>Program Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Periode B.04 di Hotel Crown, Tanjung Selor.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara 2. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara dan didampingi oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
	<p>Program Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Periode B.04 di Hotel Crown, Tanjung Selor.</p>		<p>Rapat ini dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP 2. DP3AP2KB 3. Dinas PMD 4. Diskominfo 5. Kemenag Kaltara

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
5.	Program Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 di Hotel Duta, Tarakan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat ini dipimpin oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara 2. Rapat ini membahas kegiatan – kegiatan OPD tahun 2019 yang bisa masuk ke dalam Rencana Aksi
	Program Pengendalian Konflik Sosial di Masyarakat, kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 di Hotel Duta, Tarakan.		<p>Rapat ini dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas ESDM 2. Diskominfo 3. DLH 4. DP3AP2KB 5. Dinas PMD 6. Polda Kaltara 7. Kemenag Kaltara

III. Bidang Bina Ideologi Kebangsaan

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi		Keterangan Gambar
1.	<p>Talk Show On Air Wawasan Kebangsaan Tahun 2018 di Tarakan Tema "Semangat Nasionalisme dan Peran Pemuda Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Paham Radikalisme, Hoax, dan Narkoba di Studio RRI Tarakan Tanggal 9 Maret 2018</p>			<p>Para Peserta Talk Show On Air yang terdiri dari LSM, Ormas, OKP, Organisasi Wanita, Mahasiswa Kota Tarakan.</p>

2. Rakor FKUB Tahun 2018
Tema "Peranan FKUB Prov. Kaltara dalam Pencegahan berkembangnya Paham Radikalisme serta Intoleransi di Daerah" Se-Propinsi Kalimantan Utara di **Ruang Pertemuan Kantor BKPSDM Kab. Bulungan Tanggal 24 April 2018**



Para Peserta Rakor FKUB Tahun 2018 se Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Badan Kesbangpol Kab/Kota, Camat Kab/Kota, KKUB, FPK, FKDM, serta Ormas se Provinsi Kalimantan Utara

3. Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pengetahuan Umum Tingkat Ormas/LSM/OKP Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 di **Ruang Pertemuan Gedung Ballroom Tanjung Selor Tanggal 14-15 Mei 2018**



Para Peserta Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pengetahuan Umum Tingkat Ormas/LSM/OKP Se Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang terdiri dari Badan Ormas/LSM/OKP se Provinsi Kalimantan Utara

4. Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Ruang Pertemuan Gedung Gadis Pemprov Kaltara dan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Selor Tanggal 21 Mei 2018



Para Peserta Upacara Terdiri dari Anggota Polres, Anggota Brigift 24/BC, ASN Pemprov Kaltara, ASN Kab. Bulungan, Selaku Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Utara dan Inspektur upacara Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara

5. Upacara
Hari
Kesaktian
Pancasila
Tahun
2018 di
**Lapangan
Agathis
Tanjung
Selor
Tanggal 1
Oktober
2018**



Para Talk
Show On Air
Wawasan
Kebangsaan
Tahun 2018
, yang
terdiri dari
OPD
Provinsi
Kalimantan
Utara,
Ormas se
Provinsi
Kalimantan
Utara, dan
Ormas Kab.
Bulungan

6. Talk Show On Air Wawasan Kebangsaan Tahun 2018 di **Kedai 99 Tanjung Selor** Tanggal **23 Oktober 2018**



Para Talk Show On Air Wawasan Kebangsaan Tahun 2018 , yang terdiri dari OPD Provinsi Kalimantan Utara, Ormas se Provinsi Kalimantan Utara, dan Ormas Kab. Bulungan

7. Rapat Koordinasi FPK Se-Provinsi Kalimantan Utara di **Ruang Pertemuan Gedung Gadis Pemprov. Kaltara Tanjung Selor** Tanggal 13 November 2018



Para Peserta Rapat Koordinasi FPK Se-Provinsi Kalimantan Utara , yang terdiri dari FPK Prov. Kaltara, FPK Kab/Kota, Ormas serta Badan Kesbangpol Kab/Kota

8. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Se-Provinsi Kalimantan Utara di **Ruang Pertemuan Hotel Duta Tarakan Tanggal 26 November 2018**



Para Peserta Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Se-Provinsi Kalimantan Utara , yang terdiri dari Ormas se Prov. Kaltara, Kesbangpol Kab/Kota, Ormas Kota Tarakan

IV. Bidang Politik Dalam Negeri

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
1.	<p>“Silaturahmi Gubernur Kalimantan Utara dan Dirjen Polpum Kemendagri RI Dengan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan, Tim Sukses Paslon, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Kota Tarakan Menuju Pilkada Damai Dan Berintegritas”</p> <p>Hari / Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018</p> <p>Pukul : 19.30 WITA s/d. Selesai</p> <p>Tempat / Lokasi : Ruang Serbaguna Kantor Walikota Tarakan Jl. Kalimantan No. 1 Tarakan,</p>		<p>Foto Penyampaian Laporan Panitia, Makan Bersama dan Foto Bersama Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan.</p> <p>Daftar Undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danlantamal XIII Tarakan 2. Kabinda Kalimantan Utara 3. Rektor Universitas Borneo Tarakan 4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra 7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara 8. PLT. Walikota Kota Tarakan 9. Bupati Bulungan 10. Bupati Malinau 11. Bupati Tana Tidung 12. Bupati Nunukan 13. Ketua KPUD Provinsi Kalimantan Utara 14. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 15. Dandim Kota Tarakan 16. Kapolresta Kota Tarakan 17. Danlanud Kota Tarakan 18. Danyon 613 Raja Alam Tarakan 19. Danbrimob Tarakan

Kalimantan Utara

Beban Anggaran : DPA
Badan Kesbangpol
Prov. Kaltara Tahun
Anggaran 2018,
Kegiatan Penyuluhan
Politik Kepada
Masyarakat, Kode
Rekening :
1.05.1.05.03.21.01

Jumlah Undangan : 100
Undangan



19. Komandan Detasmen C Pelopor Tarakan
20. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
21. Ketua DPRD Kota Tarakan
22. Ketua DPRD Kabupaten Malinau
23. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan
24. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung
25. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
26. Ketua KPU Kota Tarakan
27. Ketua Panwaslu Kota Tarakan
28. Anggota Komisioner KPUD Kota Tarakan
29. Anggota Komisioner Panwaslu Kota Tarakan
30. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
31. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tarakan
32. Kepala BKDD Kota Tarakan
33. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulungan
34. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau
35. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tana Tidung
36. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan
37. Anggota KPUD Kota Tarakan
38. Sekretaris KPUD Kota Tarakan
39. Paslon Ir. Sofyan Raga, M.Si dan Sabar Santuso, ST. M.Pd
40. Paslon Hj. Umi Suhartini, S.Pd. M dan Mahrudin Mado, SE
41. Paslon Drs. H. Badrun, M.Si dan H. Ince A. Rifai, SH. Mh
42. Paslon dr. Khairul, M.Kes dan Effendy

			<p>Djufrianto, SH. M.HP</p> <p>43. Tim Sukses dan Partai Pendukung</p> <p>44. Tokoh Masyarakat Kota Tarakan</p> <p>45. Tokoh Agama Kotar Tarakan</p> <p>46. Staf Badan Kesbangpol Kota Tarakan</p>
2.	<p>“Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)”</p> <p>Hari / Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018</p> <p>Pukul : 9.00 WITA s/d. Selesai</p> <p>Tempat / Lokasi : Ruang Pertemuan Hotel Kaltara Jln. Sengkawit No. 123, Tanjung Selor 77212, Kalimantan Utara</p> <p>Beban Anggaran : DPA Badan Kesbangpol Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara, Kode</p>		<p>Foto Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Penyampaian Materi oleh Kaban Kesbangpol Prov. Kaltara dan Kepala BPS Kaltim.</p> <p>Daftar Undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Kaltara 2. Kapolda Kaltara 3. Ketua Komisi 1, Bidang Hukum & Pemerintahan, DPRD Prov. Kaltara 4. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara 5. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 6. Rektor Universitas Kaltara 7. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara 8. Kepala DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara 9. Kepala BPKAD Prov. Kaltara 10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov. Kaltara 11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setprov. Kaltara 12. Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Utara 13. Komandan Kodim 0903 Tanjung Selor 14. Kapolres Bulungan

Rekening :
1.05.1.05.03.21.13

Jumlah Undangan : 50
Peserta



15. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan
16. Kepala BPS Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara
17. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tarakan
18. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan
19. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau
20. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Tidung
21. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bulungan
22. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara
23. Ketua DPD Partai Golkar Kaltara
24. Ketua DPD Partai Hanura Kaltara
25. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kaltara
26. Ketua DPD Partai Gerindra Kaltara
27. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kaltara
28. Ketua DPW Partai Nasdem Kaltara
29. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kaltara
30. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Kaltara
31. Ketua DPW Partai Bulan Bintang Kaltara
32. Ketua DPW Partai PPP Kaltara
33. Ketua DPD Partai PKPI Kaltara
34. Ketua DPD Partai Berkarya
35. Ketua KNPI Prov. Kaltara



36. Ketua Sentra Komunikasi Kaltara (Senkom)
37. Ketua Umum BEM Universitas Kaltara
38. Perwakilan Koran Radar Tarakan Kabupaten Bulungan
39. Perwakilan Koran Kaltara

<p>3. “Rapat Koordinasi Sinergitas Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara Dengan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Utara Tahun 2018”</p> <p>Hari / Tanggal : Kamis, 27 September 2018</p> <p>Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai</p> <p>Tempat / Lokasi : Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1-2 Tanjung Selor (dipindah di Ruang Pertemuan Gedung Gadis Lantai 1)</p> <p>Beban Anggaran : -</p> <p>Jumlah Undangan : 50 Peserta</p>		<p>Foto Rapat Forkopimda dengan Penyelenggara Pemilu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara.</p> <p>Daftar Undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2. Pangdam VI Mulawarman 3. Kapolda Kalimantan Utara 4. K. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 5. Dan Lantamal XIII 6. Danlanud Tarakan 7. Danrem 093/ASN 8. Kabinda Kalimantan Utara 9. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara 10. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 11. Rektor Universitas Kaltara 12. Rektor Universitas Borneo 13. Wakil Gubernur Kalimantan Utara 14. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara 15. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Utara 16. Walikota Tarakan 17. Bupati Bulungan 18. Bupati Tana Tidung 19. Bupati Malinau 20. Bupati Nunukan 21. Pj. Sekretaris Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara 22. Asisten Pemerintahan dan Kesra 23. Ketua KPUD Kabupaten Bulungan 24. Ketua Panwaslu Kabupaten Bulungan 25. Kepala Biro Pemerintahan Umum
--	--	--



26. Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Humas dan Protokol
Provinsi Kalimantan Utara
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Utara
28. Kadisdukcapil
29. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Utara
30. Ketua DPRD Kab. Bulungan
31. Ketua KPUD Kota Tarakan
32. Panwaslu Kota Tarakan
33. Ketua DPRD Kota Tarakan
34. Ketua KPUD Kabupaten Tana Tidung
35. Ketua Panwaslu Kabupaten Tana
Tidung
36. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung
37. Ketua KPUD Kabupaten Malinau
38. Ketua Panwaslu Kabupaten Malinau
39. Ketua DPRD Kab. Malinau
40. Ketua KPUD Kabupaten Nunukan
41. Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan
42. Ketua DPRD Kab. Nunukan
43. Ketua STIT Al-Anshar
44. Ketua STIE Bultar

4. **“Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018”**

Hari / Tanggal : Senin, 8 Oktober 2018

Pukul : 19.30 WITA s/d. Selesai

Tempat / Lokasi : Ruang Serbaguna Kantor Walikota Tarakan Jl. Kalimantan No. 1 Tarakan, Kalimantan Utara

Beban Anggaran : DPA Badan Kesbangpol Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Kode Rekening : 1.05.1.05.03.21.21

Jumlah Undangan : 100



Foto Pembukaan, Pembacaan Laporan Ketua Panitia, Sambutan Gubernur Katara, Penyerahan Simbolis serah terima Bankeu kepada Parpol Tingkat Prov. Kaltara dan Penyampaian Materi Sosialisasi Pemilu 2019.

Daftar Undangan :

1. Wakil Gubernur Kalimantan Utara
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
3. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara
4. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
5. Pj. Sekretaris Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Pemerintahan Umum Prov. Kaltara
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. Kaltara
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltara
9. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltara
10. Kepala BPKAD Prov. Kaltara
11. Rektor Universitas Borneo Tarakan
12. Ketua DPRD Kota Tarakan
13. Walikota Tarakan
14. Ketua KPUD Kota Tarakan
15. Bawaslu Kota Tarakan
16. Kepala Badan Kesbangpol Tarakan
17. Kepala Badan Kesbangpol Nunukan
18. Kepala Badan Kesbangpol Malinau
19. Kepala Kantor Kesbangpol Tana Tidung
20. Kepala Kantor Kesbangpol Bulungan

Peserta



22. Kabid Poldagri, Wasbang dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Tarakan
23. Kasubbid Poldagri dan Pemilu Badan Kesbangpol Tarakan
24. Pimpinan Media Harian Radar Tarakan
25. Pimpinan Media Harian Koran Kaltara
26. PKB Prov. Kaltara
27. Gerindra Prov. Kaltara
28. PDIP Prov. Kaltara
29. Golkar Prov. Kaltara
30. Nasdem Prov. Kaltara
31. Berkarya Prov. Kaltara
32. PKS Prov. Kaltara
33. Perindo Prov. Kaltara
34. PPP Prov. Kaltara
35. PSI Prov. Kaltara
36. PAN Prov. Kaltara
37. Hanura Prov. Kaltara
38. Demokrat Prov. Kaltara
39. PBB Prov. Kaltara
40. PKPI Prov. Kaltara
41. PKB Kota Tarakan
42. Partai Gerindra Kota Tarakan
43. PDIP Kota Tarakan
44. Partai Golkar Kota Tarakan
45. Partai Nasdem Kota Tarakan
46. Partai Berkarya Kota Tarakan
47. PKS Kota Tarakan
48. Partai Perindo Kota Tarakan
49. PPP Kota Tarakan
50. PSI Kota Tarakan
51. PAN Kota Tarakan
52. Partai Hanura Kota Tarakan



53. Partai Demokrat Kota Tarakan
54. PBB Kota Tarakan
55. PKPI Kota Tarakan
56. Partai Idaman Kota Tarakan
57. Partai Garuda Kota Tarakan
58. PIKA Kota Tarakan
59. Parsindo Kota Tarakan
60. Toga
61. Tomas
62. Todat
63. Ormas Komando
64. Ormas KAMMI